



BUPATI GARUT

**SAMBUTAN
PADA ACARA PEMBUKAAN DIKLAT
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. GARUT
TAHUN 2009**

HARI : SELASA
TANGGAL : 10 MARET 2009
WAKTU : PUKUL 09.00 WIB
TEMPAT : HOTEL PASEBAN

YTH. KEPALA BADAN DIKLAT DAERAH PROPINSI
JAWA BARAT;

YTH. KEPALA OPD DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN GARUT ;

YTH. PARA TAMU UNDANGAN ;

HADIRIN PARA PESERTA DIKLAT PENGADAAN BARANG
DAN JASA PEMERINTAH.

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

SEBAGAI INSAN HAMBA ALLAH, MARILAH KITA
BERSAMA-SAMA TERLEBIH DAHULU MEMANJATKAN
PUJI DAN SYUKUR YANG SETULUS-TULUSNYA
KEHADIRAT YANG MAHA KUASA ALLAH SWT, KARENA
HANYA ATAS BERKAH, RAHMAT DAN RIDHO-NYA KITA
TELAH DIBERIKAN KESEMPATAN DAPAT BERKUMPUL
DI TEMPAT INI DALAM KEADAAN SEHAT WAL'AFIAT,

UNTUK MENGIKUTI ACARA PEMBUKAAN DIKLAT
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH.

SHALAWAT SERTA SALAM SENANTIASA TETAP
TERLIMPAH CURAHKAN KEPADA JUNJUNAN KITA NABI
BESAR MUHAMMAD SAW, KELUARGANYA, PARA
SAHABAT-SAHABATNYA SERTA KITA SEMUA
PENGIKUTNYA YANG SETIA SAMPAI AKHIR JAMAN.

HADIRIN PESERTA DIKLAT YANG BERBAHAGIA,

SEBAGAIMANA KITA MAKLUMI, BAHWA
APARATUR PEMERINTAH DAN ABDI MASYARAKAT
SENANTIASA DITUNTUT UNTUK TERUS
MENINGKATKAN KEMAMPUAN, KETERAMPILAN DAN
KEAHLIAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS, KARENA
DENGAN SEMAKIN MENINGKATNYA KEMAMPUAN DAN
PENGETAHUAN AKAN BERIMPLIKASI PULA TERHADAP
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MASYARAKAT.

MANAKALA PELAYANAN LANCAR, TEPAT SASARAN DAN MEMUASKAN BAGI PIHAK YANG DILAYANI, BERARTI FUNGSI KITA SEBAGAI PELAYAN MASYARAKAT DAPAT DIKATAKAN BERHASIL, TERLEBIH-LEBIH PADA ERA REFORMASI SEKARANG INI, DIMANA DEMOKRASI DAN TRANSPARANSI DIBUKA LEBAR SEHINGGA MASYARAKAT SEMAKIN MAMPU MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH, BAIK DARI ASPEK PELAYANAN MAUPUN PENYIMPANGAN-PENYIMPANGANNYA.

SEJALAN DENGAN HAL TERSEBUT, KEGIATAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MEMPUNYAI ARTI YANG SANGAT PENTING DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEMAMPUAN DAN PROFESIONALISME KERJA, TERUTAMA DI BIDANG PENGADAAN BARANG DAN JASA. SELAIN ITU KEGIATAN INI UNTUK MEMENUHI TUNTUTAN SEBAGAIMANA YANG DIAMANATKAN DALAM KEPPRES

80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. DIMANA DALAM PASAL 9 KEPPRES 80 TAHUN 2003, PENGGUNA BARANG/JASA HARUS MEMENUHI BEBERAPA PERSYARATAN, SALAH SATUNYA ADALAH HARUS MEMILIKI SERTIFIKAT KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KITA TENTU MENGETAHUI DAN MENYADARI BERSAMA, KEGIATAN SERTIFIKASI ADALAH SUATU PROSES PENILAIAN UNTUK MENDAPAT PENGAKUAN TERHADAP KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI ATAS KOMPETENSI, KETERAMPILAN KERJA SERTA KEAHLIAN KERJA SESEORANG, YANG DALAM HAL INI BIDANG PENGADAAN BARANG DAN JASA. MAKA UNTUK MENDAPATKAN PREDIKAT TERSEBUT TENTU TIDAK SEMUDAH MEMBALIKKAN TELAPAK TANGAN, KARENA

HARUS MELALUI PENGUJIAN DENGAN STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN.

PERLU SAUDARA-SAUDARA KETAHUI DAN PAHAMI BAHWA DALAM PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SANGAT RENTAN DENGAN TINDAK KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME. UNTUK ITU PEMERINTAH SAAT INI MEMBERIKAN PERHATIAN EKSTRA TERHADAP PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA, HAL INI DIBUKTIKAN DENGAN UPAYA-UPAYA PEMERINTAH DALAM MENYEMPURNAKAN ATURAN-ATURAN YANG BERKAITAN LANGSUNG DENGAN PENGADAAN BARANG DAN JASA, BAHKAN SELAMA KURUN WAKTU REFORMASI PEMERINTAH TELAH BEBERAPA KALI MELAKUKAN PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN TERHADAP KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA.

DISAMPING PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN ATURAN TERSEBUT, UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMBERANTAS DAN MEMINIMALISIR TERJADINYA TINDAK KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME, PEMERINTAH MENGELUARKAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI. INSTRUKSI TERSEBUT DITUJUKAN KEPADA SEGENAP PENYELENGGARA PEMERINTAHAN BAIK DI TINGKAT ATAS MAUPUN BAWAH, DIMANA SALAH SATU INSTRUKSI PRESIDEN ADALAH "AGAR MELAKSANAKAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 SECARA KONSISTEN UNTUK MENCEGAH BERBAGAI MACAM KEBOCORAN DAN PEMBOROSAN PENGGUNAAN KEUANGAN NEGARA BAIK YANG BERASAL DARI APBN MAUPUN APBD".

HADIRIN PESERTA DIKLAT YANG BERBAHAGIA,
SEBAGAIMANA SAUDARA-SAUDARA KETAHUI, BAHWA
PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN INI
DIIKUTI OLEH PEGAWAI YANG SEDANG DAN AKAN
BERTUGAS SEBAGAI PENGELOLA PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH YANG DIPANDANG
SEBAGAI PALANG PINTU DAN FILTER PERTAMA
UNTUK MENCEGAH DAN MENGHAMBAT TERJADINYA
SEGALA BENTUK KEGIATAN YANG BERSIFAT
MENYIMPANG DARI KETENTUAN YANG BERLAKU.
MANAKALA PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH DAPAT MEMPOSISIKAN TUGAS POKOK
DAN FUNGSINYA SECARA PROPORSIONAL DAN
PROFESIONAL, SAYA YAKIN PRINSIP-PRINSIP DASAR
KEPPRES NOMOR 80 TAHUN 2003 YAITU EFISIENSI,
EFEKTIF, TERBUKA DAN BERSAING, TRANSPARAN,

ADIL SERTA AKUNTABEL DAPAT DILAKSANAKAN DENGAN BAIK.

SEIRING DENGAN PERAN DAN KEDUDUKAN PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH YANG SANGAT STRATEGIS, TERDAPAT TIGA PESAN SAYA YANG TIDAK DAPAT DITAWAR-TAWAR LAGI BAGI SAUDARA-SAUDARA PESERTA PENDIDIKAN DAN LATIHAN YANG INGIN MAJU, ANTARA LAIN :

1. DISIPLIN, YAITU SUATU KONDISI YANG TERCIPTA DAN TERBENTUK MELALUI PROSES DARI SERANGKAIAN PRILAKU YANG MENUNJUKAN NILAI-NILAI KETAATAN, KEPATUHAN, KESEDIAAN, KETERATURAN DAN ATAU KETERTIBAN;
2. BEKERJA KERAS DENGAN TEKAD, SEMANGAT DAN KETEGASAN YANG MELANDASI USAHA DAN PERJUANGAN INGIN MAJU;

3. BANYAK BELAJAR YANG DILANDASI SEMANGAT KEINGINTAHUAN TENTANG SESUATU SECARA PROFESIONAL.

DISAMPING ITU SAYA BERHARAP AGAR SAUDARA DAPAT DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH MENGIKUTI SEMUA MATERI YANG DIAJARKAN DAN SAYA PERCAYA SAUDARA-SAUDARA SELEPAS DARI PENDIDIKAN DAN LATIHAN INI DAPAT MENGAPLIKASIKAN ILMU YANG TELAH DIMILIKI DALAM KEGIATAN YANG KONKRIT.

DEMIKIAN KIRANYA BEBERAPA HAL YANG DAPAT SAYA SAMPAIKAN PADA KESEMPATAN YANG BERBAHAGIA INI, KEPADA PARA PESERTA DIKLAT SAYA UCAPKAN "SELAMAT MENGIKUTI DIKLAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH".

AKHIRNYA DENGAN MENGUCAPKAN
BISMILLAHIRROHMANIRROHIM DIKLAT PENGADAAN
BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT SECARA RESMI
SAYA NYATAKAN DIBUKA, DIIRINGI DO'A SEMOGA
ALLAH SWT SENANTIASA MERIDHOI UPAYA KITA
BERSAMA. AMIN.

BILLAHIT-TAUFIQ WAL-HIDAYAH

WASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

BUPATI GARUT,

ACENG HM. FIKRY, S.Ag